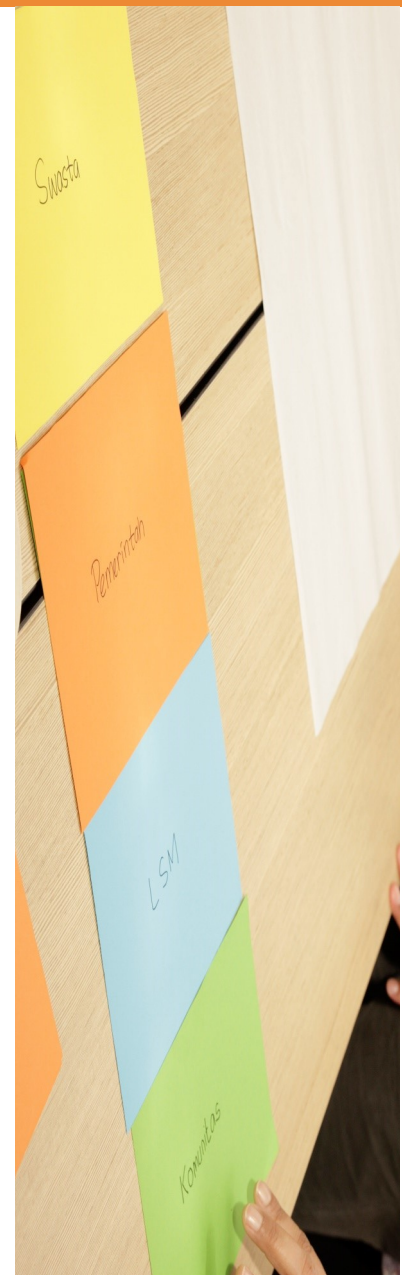


Kelembagaan pertanian organik di Jawa

Menurut SNI 6729: 2016, salah satu tujuan pertanian organik adalah menciptakan pertanian yang berkelanjutan secara sosial, ekologis, ekonomi, dan etis. Mulai dari awal tahun 2000-an, Kementerian Pertanian Republik Indonesia telah mengeluarkan sejumlah peraturan dan program yang mendefinisikan, menstandarkan, dan menetapkan agenda untuk pengembangan pertanian organik. Pendekatan pemerintah dalam mengembangkan pertanian organik berfokus pada distribusi bahan baku pertanian, penyebaran pengetahuan, dan dukungan keuangan dan kelembagaan bagi petani untuk mengajukan sertifikat organik, yang semuanya dilakukan dari atas ke bawah (top-down). Pendekatan ini tidak selalu sejalan dengan definisi holistik pertanian organik seperti yang disebutkan di atas.

Selain pemerintah, terdapat berbagai pemangku kepentingan yang berbeda yang terlibat dalam pertanian organik yang memiliki beragam tujuan, peran, dan motivasi. Untuk mengetahui para pemangku kepentingan yang membentuk aspek kelembagaan pertanian organik, kami menerapkan metode Net-Map sebagai metode partisipatoris dalam lokakarya transdisipliner yang kami selenggarakan pada tahun 2017. Pertanyaan panduan untuk metode ini adalah: Siapa pemangku kepentingan yang berpengaruh dalam pertanian organik, terutama di Jawa? Fokus pada Jawa didorong oleh komposisi peserta yang terutama aktif sebagai konsultan, petani, pejabat pemerintah, akademisi, pedagang, dan aktivis di Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Mengingat peran pemerintah yang dominan dalam mengorganisir pertanian organik di Indonesia, kami membedakan pemangku kepentingan berdasarkan tingkat keterlibatan mereka dengan pemerintah. Informasi ini dapat membantu pemerintah dalam memahami dengan lebih baik para pemangku kepentingan yang relevan dalam pertanian organik, terutama dalam hal banyaknya strategi, persepsi dan alasan mereka terkait pertanian organik.

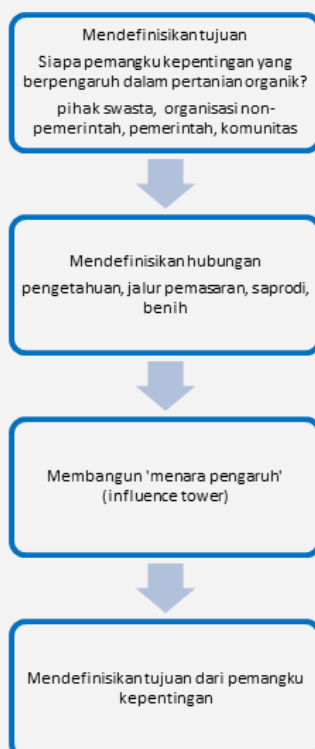


TOPIK

- Perumusan kebijakan partisipatif
- Kerja sama lintas kementerian
- Net-Map

Net-Map

Net-Map adalah alat pemetaan partisipatoris berbasis wawancara yang memungkinkan orang untuk memahami, memvisualisasikan, mendiskusikan, dan meningkatkan kondisi di mana pelaku yang berbeda dapat mempengaruhi hasil. Keuntungan dari metode ini adalah cocok untuk latar belakang antar budaya, memfasilitasi proses pembelajaran dan keterlibatan aktif di antara peserta, dan berpotensi bermanfaat bagi peserta dalam menyusun strategi kerja sama di masa mendatang dengan pemangku kepentingan lainnya. Prosedurnya adalah:



Rekomendasi

Dengan mempertimbangkan profil para pemangku kepentingan yang beragam dalam lembaga pertanian organik ini, kami memiliki rekomendasi kebijakan berikut ini:

1. **Perumusan kebijakan partisipatif:** untuk mengakomodasi keragaman tujuan, persepsi, dan strategi di antara para pemangku kepentingan pertanian organik, pemerintah dapat mempertimbangkan untuk membuat **platform bersama** dengan berbagai pemangku kepentingan untuk **bekerja sama dalam merumuskan kebijakan pertanian organik yang lebih koheren**.
2. **Kerja sama lintas kementerian:** untuk memfasilitasi pengembangan pertanian organik yang menangkap **aspirasi dan tantangan yang dihadapi petani**, Kementerian Pertanian dapat mempertimbangkan untuk bekerja sama dan berkoordinasi dengan kementerian terkait lainnya dalam mengembangkan pertanian organik, misalnya Kementerian Desa, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Perdagangan.

Perumusan kebijakan partisipatif

SNI 6729:2016 tentang Sistem Pertanian Organik memperkenalkan definisi pertanian organik yang holistik dan multi dimensional. Sejauh ini standard ini menekankan aspek ekologi dan ekonomi pertanian organik. Ini ditunjukkan oleh serangkaian langkah-langkah teknis, daftar zat yang diizinkan dan dilarang serta deskripsi mekanisme sertifikasi untuk memfasilitasi penciptaan pasar organik.

Seperti halnya pemerintah, berbagai pemangku kepentingan saling terhubung dalam hal pertukaran pengetahuan, bahan baku pertanian, dan saluran pemasaran. Dengan demikian, pelaku pertanian organik mengembangkan pemahaman, alasan, dan aspirasi yang berbeda tentang pertanian organik dibandingkan dengan pemerintah. Dalam konteks desentralisasi kekuatan pengambilan keputusan, keanekaragaman dalam pemahaman, alasan dan aspirasi ini membutuhkan keterlibatan pemangku kepentingan terkait dalam pembuatan kebijakan pertanian organik nasional. Contoh di mana pemangku kepentingan lain dapat berkontribusi di antaranya adalah dalam hal keberlanjutan sosial dan etika.

Alasan

Perumusan kebijakan partisipatif dapat membantu pembuatan kebijakan pertanian organik yang lebih koheren dan komprehensif karena dapat memfasilitasi komunikasi dan proses pembelajaran antara pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya, terutama dalam hal rasional, tantangan yang dihadapi dalam pertanian organik, dan strategi adaptasi yang memungkinkan. Sebagai contoh, kami mengidentifikasi pemangku kepentingan yang sangat kritis terhadap biaya sertifikasi organik karena hal ini menimbulkan tantangan bagi petani kecil untuk memasuki pasar organik. Strategi mereka adalah membangun komunitas pasar lokal untuk memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan produk organik non-sertifikasi pada rezim yang berbasis kepercayaan dan kontrol kelompok. Selain itu, kami mengidentifikasi sejumlah organisasi non-pemerintah, seperti Sekretariat Pelayanan Tani dan Nelayan Hari Pangan Sedunia (SPTNHPS) dan Yayasan Bina Sarana Bakti (BSB) yang merupakan pelopor pertanian organik di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Organisasi-organisasi ini sangat penting dalam memfasilitasi pengalihan teknik pertanian organik dan pengetahuan kepada organisasi non-pemerintah lainnya, petani, kelompok tani, dan badan pemerintah. Mengingat jumlah hubungan mereka di jejaring sosial (Lihat Risalah Kebijakan 7 untuk informasi tentang analisis jaringan), para pemangku kepentingan ini berpengaruh dalam mempromosikan pertanian organik dan berinteraksi dengan petani di lapangan dan karenanya dapat terlibat dalam perumusan kebijakan.

Contoh implementasi

Di Yogyakarta, ada beberapa dusun yang berpartisipasi dalam Program 1.000 Desa Organik. Meskipun sejauh ini hanya ada informasi terbatas terkait keberhasilan program ini, kami mengamati bahwa beberapa kelompok tani menerima pelatihan praktik pertanian organik yang diberikan oleh pendamping lapangan. Selain itu, kami mengamati peran pejabat pemerintah dalam mendistribusikan bahan baku organik dan memfasilitasi proses sertifikasi. Proses **pembelajaran** dan **organisasi sosial**, misalkan **kelompok tani organik**, yang dibentuk dalam program ini dapat berfungsi sebagai dasar untuk **mengidentifikasi pemangku kepentingan terkait** yang memiliki **pengalaman** dan **pengetahuan** dalam pertanian organik. Dengan demikian, ini berpotensi untuk berkontribusi pada perumusan **kebijakan dari tingkat desa**.



IndORGANIC

Proyek penelitian IndORGANIC

Prof. Martina Padmanabhan

Ketua Kajian Perbandingan Pembangunan dan Budaya (Fokus: Asia Tenggara)

Dr.-Hans-Kapfinger-Straße 14b
94032 Passau, Jerman

Penulis: Dimas D. Laksmana

Kontak: Dimas.DwiLaksmana@uni-passau.de

Passau, Januari 2020



Bundesministerium
für Bildung
und Forschung

Kerja sama lintas kementerian

Kementan dan dinasnya mengambil peran utama dalam merancang kebijakan dan program pertanian organik, implementasinya, dan pemantauannya. Selain itu, beberapa tujuan pertanian organik, seperti keanekaragaman hayati dan konservasi lingkungan dan perdagangan internasional, dapat berfungsi sebagai titik masuk untuk bekerja sama dengan kementerian lain. Oleh karena itu, untuk mengembangkan pertanian organik secara terpadu dan holistik, Kementan dapat mempertimbangkan kerja sama dengan kementerian lain, terutama dalam mengimplementasikan dan mengevaluasi program-program pertanian organik nasional.

Alasan

Kerja sama lintas kementerian berpotensi untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan dan program pertanian organik. Saat ini kebijakan pertanian organik menekankan sisi produksi, namun petani organik masih menghadapi tantangan dalam menjual produk mereka yang bersertifikat organik. Selain itu, dokumentasi tentang manfaat lingkungan dari pertanian organik di Indonesia masih terbatas. Sejauh ini dinas pertanian mengadakan pasar tani untuk mendukung petani organik di kabupaten atau kecamatan. Namun, petani organik masih membutuhkan dukungan untuk mengakses pasar internasional. Berdasarkan penelitian kami, kami mengidentifikasi para pemangku kepentingan, misalnya Batik Wahyu Tumurun yang menjual batik dengan pewarna alami dan koperasi buah salak, yang berinteraksi erat dengan departemen industri dan perdagangan dalam bertukar informasi tentang pameran perdagangan untuk produk organik atau alami. Karena itu, kerja sama yang lebih erat antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan dapat membantu para petani organik dalam mengakses pasar internasional. Selain itu, kebijakan pertanian organik secara eksplisit menyebutkan kontribusi pertanian jenis ini terhadap konservasi lingkungan dan keanekaragaman hayati. Oleh karena itu Kementerian Pertanian dapat mempertimbangkan untuk menggali kerja sama yang lebih erat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk secara sistematis mengevaluasi dan menilai potensi manfaat lingkungan dari pertanian organik.

Contoh implementasi

Lahan pertanian sebagian besar terletak di daerah pedesaan dan beragam secara ekologis, budaya, dan sosial. Kepala desa biasanya memiliki informasi yang cukup tentang kondisi lokal ini. Selain itu, ketersediaan **dana desa** memungkinkan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan warga di mana kebutuhan dibahas dari tingkat lingkungan tempat tinggal hingga tingkat desa. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian dapat menjalin kerja sama dengan **Kementerian Desa**, misalnya petugas penyuluh lapangan dapat bekerja sama dengan kepala desa untuk mengidentifikasi peluang dan kebutuhan untuk mengidentifikasi area potensial di mana pertanian organik dapat menjadi bagian dari rencana pembangunan desa.